

**PENGARUH *IFRS CONVERGENCE*, *CORPORATE GOVERNANCE*, DAN
OWNERSHIP STRUCTURE TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
*MANDATORY DISCLOSURE***

(Studi Empiris Pada Perusahaan yang terdaftar di BEI)

Rahmi Dwi Yuliana
rahmidwiiyuliana@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to analyze and provide empirical evidence of the influence of IFRS convergence, corporate governance, and ownership structure towards mandatory disclosure compliance level. This study uses secondary data from the annual report of all companies listed in Indonesia stock exchange period 2010-2014. This study uses purposive sampling method and resulted 60 firms. The method of analysis of this study used multi regression with SPSS 23.0. Program. The results showed that IFRS convergence, the number of commissioner members, and the number of board meetings have a positive influence on mandatory disclosure compliance level, and the number of audit committee, the competence of the audit committee, the number of risk management committee, institutional ownership, and foreign ownership had no influence on mandatory disclosure compliance level.

Keywords: independent commissioner, audit committee, ownership structure, mandatory disclosure, IFRS

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan suatu media bagi perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan, dan memberikan informasi tentang keuangan perusahaan tersebut bagi pihak luar agar dapat berinvestasi di dalam perusahaannya (Sutiyok dan Rahmawati, 2014). Laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik, agar penyajian, pelaporan dan pengungkapan

informasi keuangan perusahaan dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi. Untuk menjadikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas, maka diperlukan juga sebuah standar akuntansi yang berkualitas. IFRS (*International Financial Reporting Standard*) merupakan salah satu standar yang berkualitas karena mengharuskan pengungkapan secara penuh (*full disclosure*) sehingga menyediakan informasi yang lebih luas bagi pengguna laporan keuangan.

Penelitian ini akan meneliti pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*), karena merupakan pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi dan peraturan yang berlaku (Suwardjono, 2005). Gunawan dan Hendrawati (2016) menyatakan bahwa peraturan mengenai *mandatory disclosure* di Indonesia telah diatur oleh Bapepam-LK melalui Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Karena telah diatur oleh Bapepam-LK maka seharusnya tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* perusahaan di Indonesia semakin ideal.

Pada kenyataannya perusahaan-perusahaan di Indonesia masih ada yang mengalami beberapa kasus ketidakpatuhan *mandatory disclosure* salah satunya terjadi pada perusahaan PT Petromine Energy Trading yang tidak mencantumkan pendapatan dari jasa penyediaan bahan bakar AKR Corporindo senilai Rp 1,370 triliun (Prayogi, 2011 dalam Prawinandi, 2012). Kasus ini menjadi salah satu contoh perusahaan tidak ingin menampilkan item yang

merupakan bagian dari *mandatory disclosure*. Akibatnya informasi yang disajikan tidak dapat memberikan nilai tambah terhadap informasi keuangan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Konvergensi IFRS belum dapat menjamin bahwa perusahaan akan melakukan kepatuhan pengungkapan, oleh karena itu diperlukan *Corporate Governance* yang dapat memonitor manajer dan mengelola perusahaan untuk menjamin bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi secara transparan. Transparansi sangat diperlukan dalam laporan keuangan. Karena laporan keuangan tidak hanya untuk para pengguna laporan keuangan tetapi juga sebagai tanggung jawab kepada Allah SWT, hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang ditegaskan dalam surat *al-Baqarah* ayat 282:

“...dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...”.

Oleh karena itu pengungkapan informasi keuangan harus diungkapkan secara transparan dan lebih luas. Penelitian mengenai tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* telah dilakukan sebelumnya diantaranya yaitu Prawinandi *et al.* (2012), Utami *et al.* (2012), Pitasari dan Septiani (2014), Supriyono *et al.* (2014), Sutiyok dan Rahmawati (2014), Alvionita dan Taqwa (2015), Hafiz *et al.* (2015), serta Gunawan dan Hendrawati (2016). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten, selain itu penelitian sebelumnya banyak yang berfokus pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian kembali tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* dan

melihat perbedaan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.

Penelitian terdahulu objek penelitian hanya terbatas pada satu sub sektor perusahaan yang terdaftar di BEI, contohnya Supriyono *et al.* (2014) yang mana objek penelitian hanya terbatas pada perusahaan perbankan, Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat lebih umum (general), maka dibutuhkan penelitian yang lebih luas cakupannya, yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah IFRS *Convergence* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*?, apakah struktur eksternal maupun eksternal *Corporate Governance* yang diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, kompetensi komite audit, jumlah manajemen risiko, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*?

TINJAUAN LITERATUR DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini berkaitan dengan kontrak dua pihak yaitu *agent* dan *principal*. Manajer sebagai *agent* diwajibkan untuk memberikan laporan *periodic* kepada

principal. *Principal* akan menilai kinerja *agent* nya melalui laporan keuangan termasuk pengungkapan yang disampaikan kepadanya (Sutiyok dan Rahmawati, 2014).

Manajer biasanya lebih mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan dengan *principal* hal ini akan menyebabkan terjadinya asimetri informasi, oleh sebab itu pengungkapan yang dilakukan secara penuh diharapkan akan dapat mengurangi tingkat asimetri informasi

IFRS Convergence dan tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

IFRS dikenal sebagai standar yang lebih berbasis prinsip (*principle-based standard*), Salah satu implikasi dari *principle based standard* adalah IFRS menuntut pengungkapan yang lebih luas dan lebih rinci atau *full disclosure* (Putri dan Widiastuti, 2015). Artinya jika perusahaan melakukan Konvergensi IFRS maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Penelitian Putri dan Widiastuti (2015) menghasilkan Konvergensi IFRS berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan risiko, menurut Surat Edaran Ketua Bapepam (P3LKEPPBANK 2008) dalam Suhardjanto *et al.* (2012) pengungkapan risiko di perbankan Indonesia merupakan pengungkapan yang wajib (*mandatory disclosure*).

H₁: IFRS *Convergence* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Teori agensi menjelaskan mengenai jumlah dewan komisaris. Dewan komisaris berperan penting dalam mengawasi kinerja perusahaan. Dewan komisaris yang besar akan membantu dalam melakukan pemantauan lebih (Sutiyok dan Rahmawati, 2014). Sehingga semakin besar jumlah dewan komisaris maka semakin besar pemantauan yang dilakukan terhadap memperluas pengungkapan.

Penelitian Supriyono *et al.* (2014), Hafiz *et al.* (2015), serta Gunawan dan Hendrawati (2016) yang menemukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

H₂: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Jumlah Anggota Komite Audit dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Komite audit bertugas untuk mendampingi dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan kinerja perusahaan dan pelaksanaan tanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2004 dalam Suaryana, 2007). Sehingga semakin banyak jumlah anggota komite audit maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan terhadap pembuatan laporan keuangan termasuk pengungkapan informasi keuangan yang lebih luas.

Pitasari dan Septiani (2014) serta Supriyono *et al.* (2014) menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

H₃: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Rapat Dewan Komisaris akan menghasilkan nasihat dan kebijakan bagi direksi dalam pengambilan keputusan (Supriyono *et al.*, 2014). Keputusan dewan direksi salah satunya adalah mengenai perluasan pengungkapan. Sehingga semakin banyak rapat yang dilakukan, maka semakin banyak keputusan dewan direksi terhadap perluasan pengungkapan.

Penelitian Kharis dan Suhardjanto (2012), serta Barros *et al.* (2013) menemukan bahwa Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan.

H₄: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Kompetensi Komite Audit dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Supriyono *et al.* (2014) menjelaskan bahwa Anggota Komite Audit selain harus orang yang independen juga harus mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam bidang keuangan dan akuntansi, yang diharapkan dapat membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Sehingga semakin banyak perusahaan yang memiliki

komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan maka semakin pelaporan keuangan semakin berkualitas.

Penelitian Felo *et al.* (2003) menemukan bahwa keahlian akuntansi dan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, serta mendukung pengungkapan.

H₅: Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Jumlah Komite Manajemen Risiko dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Keberadaan Komite Manajemen Risiko (KMR) diharapkan akan dapat membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya sebagai upaya melindungi para pemangku kepentingan dan mencapai tujuan perseroan (Wahyuni dan Harto, 2012), Termasuk dalam pengawasan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Jadi semakin banyak jumlah komite manajemen risiko maka semakin besar pengawasan yang dilakukan dalam membantu dewan komisaris untuk memluas pengungkapan dan akan dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure*.

Penelitian Meizaroh dan Lucyanda (2011) menunjukkan bahwa keberadaan Komite Manajemen Risiko berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dan diharapkan akan berpengaruh terhadap *mandatory disclosure*.

H₆: Jumlah Komite Manajemen Risiko berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Kepemilikan Institusional dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Kehadiran investor institusi sangat relevan dalam struktur kepemilikan pada umumnya, hal ini memungkinkan mereka untuk mengontrol langsung manajer perusahaan dalam hal pelaporan dan pengungkapan informasi keuangan (Hidalgo *et al.*, 2011) sehingga dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure*.

Penelitian Utami *et al.* (2012), serta Alvionita dan Taqwa (2015) menemukan pengaruh positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela, sehingga diharapkan juga kepemilikan institusional yang besar akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

H₇: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Kepemilikan Asing dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas (Huafang dan Jianguo, 2007 dalam Rustiarini, 2011), hal ini dikarenakan seringnya terjadi asimetri informasi yang disebabkan oleh hambatan geografis dan bahasa.

Hasil penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) menemukan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib.

H₈: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010, 2011, 2013, dan 2014, tahun ini dipilih untuk melihat tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* sebelum dan sesudah konvergensi IFRS tahun 2012. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria pemilihan sampel tersebut diantaranya:

1. Seluruh perusahaan yang *listing* berturut-turut di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010, 2011, dan tahun 2013, 2014
2. Menyajikan data laporan tahunan yang lengkap selama periode penelitian
3. Menyajikan data laporan tahunan lengkap tahun 2010, 2011 dan 2013, 2014 secara berturut-turut.
4. Memiliki kepemilikan institusional dan kepemilikan asing selama periode penelitian

Jenis dan Sumber Data

Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari *annual report* semua perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010, 2011, dan 2013, 2014.

Defenisi Operasional Variabel dan Alat Ukur

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *mandatory disclosure*. Identifikasi item pengungkapan dilakukan dengan menggunakan *checklist* pengungkapan wajib yang diwajibkan berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK No. VIII.G.7 yaitu sebanyak 73 item tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan seperti yang dilakukan oleh Kadir (2015).

Pengungkapan wajib diukur dengan menggunakan teknik dikotomis, yaitu jika item dapat diterapkan (*applicable*) dalam perusahaan dan diungkapkan diberi skor 1 dan jika tidak diungkapkan diberi skor 0.

$$MANDSCORE = \frac{\text{Total klasifikasi item yang diungkapkan}}{\text{Jumlah item}} \times 100$$

IFRS Convergence

Pada penelitian ini, pengukuran konvergensi IFRS dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy tahun* (Putri dan Widiastuti, 2015) dengan nilai 1 untuk perioda setelah kovergensi IFRS secara penuh yaitu tahun 2013 dan 2014, dan nilai 0 untuk perioda pra konvergensi IFRS, yaitu tahun 2010 dan 2011.

Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Jumlah dewan komisaris yang dimaksud di sini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam suatu perusahaan (Supriyono *et al.*, 2014).

Jumlah Anggota Komite Audit

Untuk mengukur variabel ini dilakukan dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam perusahaan (Supriyono *et al.*, 2014).

Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam penelitian ini diukur dengan melihat jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris pada laporan tahunan perusahaan selama satu periode (Supriyono *et al.*, 2014).

Kompetensi Komite Audit

Kompetensi Komite Audit diukur dengan melihat jumlah komite audit yang memiliki keahlian dibidang akuntansi, rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{kompetensi} = \frac{\text{komite yang ahli akuntansi}}{\text{jumlah komite audit}} \times 100\%$$

Jumlah Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko diukur dengan melihat jumlah Komite Manajemen Risiko yang ada pada laporan keuangan tahunan.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional diukur dengan melihat jumlah saham yang dimiliki oleh institusi lokal di dalam perusahaan. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{\text{saham yang dimiliki institusi lokal}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Asing

Kepemilikan Asing diukur dengan melihat jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing di dalam perusahaan. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan asing} = \frac{\text{Saham yang dimiliki asing}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Hasil Uji Statistik Deskriptif menunjukkan bahwa variabel Konvergensi IFRS dilakukan dengan metode *dummy* yaitu 0 dan 1, dan menunjukkan bahwa 50% perusahaan di Indonesia telah menerapkan konvergensi IFRS, dari 240 sampel yang diteliti jumlah anggota dewan komisaris yang terkecil sebanyak 2 orang dan terbesar sebanyak 11 orang, dari 240 sampel yang diteliti jumlah anggota komite audit terkecil yang ada dalam perusahaan adalah 1 orang dan terbesar sebanyak 6 orang.

Jumlah Rapat Dewan Komisaris yang paling banyak dilakukan oleh dewan komisaris adalah sebanyak 51 kali, masih ada perusahaan yang tidak mempunyai komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, dan juga menunjukkan bahwa ada perusahaan yang komite audit seluruhnya memiliki komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan yang ditunjukkan dengan jumlah maximum 1, masih ada perusahaan yang tidak

memiliki komite manajemen risiko di dalam perusahaan, dan ada perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko sebanyak 22 orang.

Kepemilikan Institusional di dalam perusahaan yang terkecil sebesar 1% dan terbesar sebesar 99%, dan 37,94% perusahaan di Indonesia dimiliki oleh institusi lokal. Kepemilikan Asing di dalam perusahaan sebesar 2% dan terbesar sebesar 96%, dan 38,67% perusahaan di Indonesia dimiliki oleh investor asing.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 1
Hasil Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,556	,029		19,511	,000
	KOIF	,057	,008	,348	6,734	,000
	JADK	,010	,002	,215	4,042	,000
	JAKA	-,006	,007	-,049	-,857	,393
	JRDK	,004	,001	,296	5,386	,000
	KOKA	-,017	,017	-,050	-,950	,343
	JKMR	-,007	,001	-,344	-6,273	,000
	KEIN	-,140	,023	-,418	-6,036	,000
	KEAS	-,105	,022	-,332	-4,853	,000

Pengujian Hipotesis Satu (H₁)

Variabel *IFRS Convergence* memiliki nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ dengan arah yang positif 0,057 artinya (H₁) diterima. Hasil hipotesis mengindikasikan bahwa perusahaan yang telah menerapkan IFRS dituntut untuk

melakukan pengungkapan secara penuh (*full disclosure*), sehingga pengungkapan menjadi berkualitas.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Daske dan Gebhardt (2006) yang menemukan bahwa IFRS dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan informasi keuangan di berbagai Negara.

Pengujian Hipotesis Dua (H₂)

Variabel Jumlah Anggota Dewan Komisaris memiliki nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ dengan arah yang positif 0,010 artinya (H₂) diterima.

Hasil hipotesis mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris maka semakin besar evaluasi yang dilakukan dewan komisaris terhadap manajemen dalam rangka memperluas pengungkapan (Pitasari dan Septiani, 2014).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Supriyono *et al.* (2014), Sutiyok dan Rahmawati (2014), Hafiz *et al.* (2015) dan Gunawan dan Hendrawati (2016) yang menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Pengujian Hipotesis Tiga (H₃)

Variabel Jumlah Anggota Komite Audit memiliki nilai sig sebesar 0,393 $> \alpha (0,05)$ artinya (H₃) ditolak.

Hasil hipotesis menindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota komite audit akan menyebabkan komunikasi dan koordinasi menjadi sulit sehingga tugas komite audit dalam rangka membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* menjadi tidak efektif.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Utami *et al.* (2012), Sutyok dan Rahmawati (2014), dan Hafiz *et al.* (2015) yang menemukan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Pengujian Hipotesis Empat (H₄)

Variabel Jumlah Rapat Dewan Komisaris memiliki nilai sig sebesar 0,000 < α (0,05) dengan arah yang positif 0,004 artinya (H₄) diterima.

Hasil hipotesis menindikasikan bahwa semakin sering dilakukan rapat maka semakin banyak nasihat dan kebijakan yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kharis dan Suhardjanto (2012), Barros *et al.* (2013), serta Sutyok dan Rahmawati (2014) yang menemukan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Pengujian Hipotesis Lima (H₅)

Variabel Kompetensi Komite Audit memiliki nilai sig sebesar $0,343 > \alpha$ (0,05) artinya (H₅) ditolak.

Hasil hipotesis mengindikasikan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas komite audit membantu tugas dewan komisaris melakukan pengawasan pembuatan laporan keuangan, keahlian komite audit dibidang akuntansi saja belum efektif, diperlukan juga pengalaman komite audit di bidang akuntansi dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap suatu pekerjaannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Supriyono *et al.* (2014) yang menemukan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan wajib.

Pengujian Hipotesis Enam (H₆)

Variabel Jumlah Komite Manajemen Risiko memiliki nilai sig sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05) dengan arah yang negatif - 0,007 artinya (H₆) ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah komite manajemen risiko maka semakin rendah tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Hal ini mungkin disebabkan masih banyaknya perusahaan di Indonesia yang belum memiliki komite manajemen risiko, karena perusahaan di Indonesia masih banyak yang mengintegrasikan tugas komite manajemen risiko dengan

komite audit hal ini sesuai dengan penelitian Subramaniam *et al.* (2009) yang menemukan bahwa ditemukan komite manajemen risiko masih ada yang diintegrasikan dengan komite audit.

Pengujian Hipotesis Tujuh (H₇)

Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai sig sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05) dengan arah yang negatif - 0,140 artinya (H₇) ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh institusi maka akan mengurangi tingkat *mandatory disclosure* yang dilakukan perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan karena selama ini investor institusional hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi saja tanpa memperdulikan tanggung jawab perusahaan pada *stakeholders* lain (Rustiarini, 2011).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rustiarini (2011) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Menurut Putra (2013) Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*).

Pengujian Hipotesis Delapan (H₈)

Variabel Kepemilikan Asing memiliki nilai sig sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05) dengan arah yang negatif - 0,105 artinya (H₈) ditolak. Hal ini mengindikasikan

bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh Asing maka akan mengurangi tingkat *mandatory disclosure* yang dilakukan perusahaan.

Tersebarnya mayoritas kepemilikan saham kepada pihak asing akan menyebabkan pelaksanaan pengawasan menjadi lemah (Yuliawati dan Sukirman, 2015) sehingga tidak dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliawati dan Sukirman (2015) yang menemukan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang menurut Putra (2013) merupakan pengungkapan *mandatory disclosure*.

HASIL PENGUJIAN TAMBAHAN

Tabel 2
Paired Sample t Test Statistics

Paired Samples Statistics				
	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
SEBELUM_IFRS	,4912	120	,07952	,00726
SESUDAH_IFRS	,5480	120	,07382	,00674

Tabel 3
Paired Sample t Test

		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	
					Lower	Upper			
Pair 1	SEBELUM_IFRS - SESUDAH_IFRS	-,05683	,06171	,00563	-,06799	-,04568	10,088	119	,000

Tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* sesudah dan sebelum konvergensi IFRS mengalami kenaikan, yaitu 49,12% sebelum konvergensi IFRS dan sesudah konvergensi IFRS sebesar 54,80%. Nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari α (0,05), hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pengungkapan *mandatory disclosure* sebelum dan sesudah diterapkannya konvergensi IFRS.

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Simpulan

Variabel IFRS *Convergence*, Jumlah Anggota Dewan Komisaris, dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Variabel Jumlah Anggota Komite Audit, dan Kompetensi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, dan Variabel Jumlah Komite Manajemen Risiko, Kepemilikan

Institusional, dan Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pengungkapan *mandatory disclosure* di seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diterapkannya konvergensi IFRS secara penuh di Indonesia, dan Rata-rata tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia mengalami kenaikan sebelum konvergensi IFRS dan sesudah Konvergensi IFRS yaitu sebesar 49,12 % dan 54,80%.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan mengganti item *checklist* lain selain yang diterbitkan oleh BAPEPAM LK No. VIII.G.7 No. KEP-347/BL/2012 Tanggal 25 juni 2012 untuk mengukur *mandatory disclosure* dan memperbarui item *checklist* yang digunakan sehingga sesuai dengan keadaan saat ini.

Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel yang lebih luas, menambah beberapa proksi dari *Good Corporate Governance*, dan penelitian selanjutnya diharapkan bisa membandingkan dengan negara lain yang masih serumpun (studi komparatif).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengukur komisaris, komite audit, rapat dewan komisaris, dan komite manajemen risiko dengan jumlahnya saja, dan penelitian ini menggunakan item *checklist* yang diterbitkan oleh BAPEPAM LK No. VIII.G.7

No. KEP-347/BL/2012 Tanggal 25 juni 2012 yang hanya berjumlah 73 item dan hanya menggunakan teknik *dummy* 0 jika tidak diungkapkan, 1 jika diungkapkan, seharusnya ditambah N/A jika item tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan, karena aturan yang digunakan adalah aturan tahun 2012, sedangkan periode penelitian memakai tahun 2010 dan tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-quran dan terjemahannya. Surah *Al-baqarah* ayat 282. *Al-Mizan Publishing House*, Bandung.
- Alvionita, Intan, dan Taqwa S. 2015. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*. *Makalah Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Barros, C. P., Boubaker, S., dan Hamrouni, A. 2013. *Corporate Governance and Voluntary Disclosure in France*. *Journal of Applied Business Research (JABR)* Vol. 29 No. 2 P. 561-578.
- Felo, A. J., Krishnamurthy, S., dan Solieri, S. A. 2003. *Audit committee characteristics and the perceived quality of financial reporting: an empirical analysis*. Available at SSRN 401240.
- Gabriella, Erida Handayani Tamba. 2011. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Skripsi Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Daske, H., dan Gebhardt, G. 2006. *International financial reporting standards and experts' perceptions of disclosure quality*. *Abacus*, Vol. 42 No. 3-4, P. 461-498.
- Gunawan, B., dan Hendrawati, E. R. 2016. Peran Struktur *Corporate Governance* dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1 No. 1 P. 71-83
- Hafiz, R. M., Adriani A., dan Chairina. 2015. Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, Medan.
- Hidalgo, R. L., García-meca, E., & Martínez, I. 2011. *Corporate Governance and Intellectual Capital Disclosure*. *Journal of Business Ethics*. Vol. 100 No. 3 P. 483-495.

- Kadir, R. D. 2015. Pengaruh Kepemilikan Saham, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur tahun 2010-2013. *Doctoral Dissertation*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kharis, A., dan Suhardjanto. 2012. *Corporate Governance* dan Ketaatan Pengungkapan Wajib pada Badan Usaha Milik Daerah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 16 No. 1 P. 37-44.
- Meizaroh dan Jurica Lucyanda. 2011. Pengaruh *Corporate Governance* dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan *Enterprise Risk Management*. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIV*, Banda Aceh.
- Pitasari, Anggita, dan A. Septiani. 2014. Analisis Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 3 No. 2 P. 2337-3806.
- Prawinandi, W., Suhardjanto D., dan Triatmoko H. 2012. Peran Struktur *Corporate Governance* dalam Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Putra, I., 2013., “Pengaruh Tingkat Pengungkapan Item *Corporate Social Responsibility* Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Sri-Kehati Selamatahun 2009–2011)”, *Doctoral dissertation*, UAJY.
- Putri, R. S., dan Widiastuti, Harjanti, 2015, “Pengaruh Konvergensi IFRS dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko”, *Call for Paper Konferensi Regional Akumtamsi II*, Jawa Timur.
- Rustiarini, N. W. 2011. Pengaruh struktur kepemilikan saham pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 6 No.1 P. 1-24
- Suaryana, A. 2007. Pengaruh komite audit terhadap kualitas laba. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Vol. 2 No. 1 P. 1-22

- Subramaniam, Nava., L. McManus., dan Jiani Zhang. 2009. *Corporate Governance, Firm Characteristics, and Risk Management Committee Formation in Australia Companies. Managerial Auditing Journal*, Vol. 24 No. 4 P. 316-339.
- Suhardjanto, D., A. Dewi., Erna R., dan Firazonia M. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* dalam Praktik *Risk Disclosure* di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Vol. 9 No. 1 P. 16-30.
- Supriyono, Edi, Mustaqim A. B., dan Suhardjanto D. 2014. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS di Indonesia. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII*, Mataram.
- Sutiyok, dan Rahmawati, Evi. 2014. “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS di Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Inventasi* Vol. 15 No. 2 P. 152-162
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*, Edisi III, Yogyakarta: BPFE.
- Utami, W. D., Suhardjanto D., dan Triatmoko S. 2012. Investigasi Dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme *Corporate Governance*. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Wahyuni, Tri, dan P. Harto. 2012. Analisis Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko (Studi Kasus pada perusahaan yang Listing di BEI periode 2008-2010). *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 1 No. 2 P. 1-12.
- Yulawati, R., dan Sukirman, S. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Accounting Analysis Journal* Vol. 4 No.4 P.1-9.